BAB II

KEBIJAKAN ANGELA MERKEL DALAM PROYEK NORD STREAM 2

Angela Dorothea Merkel merupakan seorang politisi Jerman yang menjabat sebagai Kanselir Jerman dari tahun 2005 hingga 2021 dan terkenal karena beberapa aspek penting dalam karir politiknya. Selama masa jabatannya, ia dikenal akan kepemimpinan, ketahanan (*resilience*), dan kontribusi yang diberikannya terhadap politik Jerman dan Eropa, menjadikannya salah satu pemimpin paling berpengaruh di dunia. Pada tahun 2015, TIME menyebut Merkel sebagai tokoh penting pada tahun tersebut (Person of The Year) oleh karena keberaniannya "untuk meminta lebih banyak dari negaranya daripada yang berani dilakukan kebanyakan politisi, untuk berdiri teguh di hadapan tirani begitu juga dengan kebijaksanaannya dan kepemimpinan moralnya yang kokoh di dunia yang kekurangan kebijaksanaan" (Gibbs, 2015). Merkel dikenal karena pendekatan pragmatis dan berhati – hatinya, yang sering disebut sebagai "Merkelisme" atau "gaya Merkel". Ia memimpin Jerman melalui serangkaian peristiwa dan tantangan signifikan dalam beberapa tahun silam, seperti krisis utang Eropa, krisis pengungsi, dan pandemi COVID-19. Pada Oktober 2018, Merkel mengumumkan bahwa ia tidak akan mencalonkan diri kembali sebagai pemimpin Partai Persatuan Demokrat Kristen Jerman (CDU) dan akan mengundurkan diri sebagai kanselir pada akhir masa jabatannya pada tahun 2021.

Bab ini akan memaparkan beberapa hal yang dapat membantu pembaca dalam mengenal dan mengetahui subjek penelitian lebih dalam. Pada bagian pertama, pembahasan akan difokuskan pada latar belakang Angela Merkel. Ini secara khusus akan menyoroti masa muda Angela Merkel dan transisinya ke dunia politik. Pada bagian kedua, peneliti akan secara spesifik membahas mengenai kebijakan energi Jerman dibawah Angela Merkel. Didalamnya juga akan terdapat pemaparan mengenai proyek Nord Stream 2 (NS2) dalam kerangka kebijakan energi tersebut, berikut dengan sejarah perkembangan proyek Nord Stream 2, pihak – pihak yang terlibat, kontroversi seputar proyek dan keterlibatan Merkel didalamnya.

2.1 Latar Belakang Angela Merkel

2.1.1 Masa Muda

Angela Merkel lahir pada 17 Juli 1954 di Hamburg, Jerman Barat, dengan nama Angela Dorothea Kasner. Orang tuanya ialah Horst Kasner, seorang pendeta Lutheran, dan Herlind Jentzsch. Ketika Merkel baru berusia beberapa minggu, keluarganya kemudian berpindah ke Jerman Timur, dimana ayahnya menerima panggilan sebagai pendeta di daerah itu. Mereka menetap di Templin, sebuah kota kecil dengan hamparan hutan pinus, perbukitan, dan danau yang terletak di distrik Uckermark di Brandenburg, sekitar 80 kilometer utara Berlin (Crawford & Czuczka, 2013). Di tempat itulah orang tua Merkel membesarkannya dan kedua adiknya. Adapun masa muda Merkel kental dipengaruhi oleh lingkungan

politik dan sosial Republik Demokratik Jerman (GDR), dimana ia hidup dibawah rezim sosialis yang ketat.

Gambar 2.1

Angela Kasner Saat Berumur 1 Tahun

Sumber: *TIME*

Republik Demokratik Jerman (Jerman: *Deutsche Demokratische Republik*) merupakan nama resmi Jerman Timur, sebuah negara sosialis yang hadir pada tahun 1949 hingga 1990. Negara itu didirikan setelah Perang Dunia II dan berada dibawah kontrol Uni Soviet. Ini berawal dari Konferensi Potsdam pada tahun 1945, ketika Sekutu sepakat untuk membagi Jerman menjadi empat zona pendudukan, dengan Inggris di barat laut, Prancis di barat daya, Amerika Serikat di selatan, dan Uni Soviet di timur. Berlin yang pada dasarnya berada di wilayah Uni Soviet pun terbagi

menjadi empat zona terpisah (Center of European Studies, n.d.). Keempat negara turut bekerja sama melalui Dewan Kontrol Sekutu, yang didirikan pada Agustus 1945 dan bermarkas di Berlin, untuk mengawasi semua hal yang berkaitan dengan Jerman (National Army Museum, n.d.). Pada waktu itu, Amerika Serikat dan Uni Soviet mulai muncul sebagai kekuatan adidaya yang berlawanan secara ideologis, keduanya berjuang untuk memperluas pengaruh mereka di dunia pascaperang. Jerman telah menjadi fokus politik Perang Dingin, dan seiring dengan semakin jelasnya pembagian antara Timur-Barat, begitu juga dengan pembagian Jerman. Akhirnya, pada tahun 1949, Jerman secara resmi terbagi menjadi dua negara merdeka yakni Republik Federal Jerman (FRG atau Jerman Barat) dan Republik Demokratik Jerman (GDR atau Jerman Timur) (Imperial War Museums, n.d.).

Gambar 2.2

Peta Pembagian Jerman setelah Perang Dunia II

Sumber: *Encyclopædia Britannica*

Tahun – tahun tenang bagi Angela Kasner dan keluarganya berakhir pada 13 Agustus 1961. Dalam operasi yang berlangsung selama 24 jam dan dimulai pada malam 12 Agustus 1961, tentara Soviet melakukan blokade pada stasiun kereta dan kereta bawah tanah serta jalan – jalan di Berlin Timur. Mereka kemudian mulai membangun tembok beton dan baja setinggi 12 kaki yang ditutupi dengan kawat berduri dan diperlengkapi senapan mesin (Mills, 2008). Tembok tersebut membentang sekitar 155 kilometer melintasi kota Berlin, secara efektif memotong Berlin Barat dengan Berlin Timur (Imperial War Museums, n.d.). Adapun tujuan utama Tembok Berlin dibangun ialah untuk membendung gelombang emigrasi dari Jerman Timur ke Jerman Barat yang terjadi secara masif. Soviet dan

Jerman Timur kembali membangun penghalang lain sekitar 100 meter di luar tembok aslinya pada tahun 1962. Setelah tembok selesai dibangun, terdapat lebih dari 260 orang penduduk mencoba melarikan diri ke Jerman Barat dan berakhir tewas (John F. Kennedy Presidential Library, n.d.). Itu adalah ingatan pertama Merkel tentang peristiwa politik.

GDR menerapkan berbagai larangan dan batasan kepada penduduknya, ini termasuk pembatasan perjalanan dan akses informasi dari dunia luar. Mereka mengelola dan mengendalikan seluruhnya secara berhati – hati seperti senjata. Dalam masa mudanya, Merkel hidup berdampingan dengan aturan – aturan tersebut. Ia mengenyam pendidikan dengan kurikulum yang ditetapkan disana dan melahap berbagai literatur klasik Rusia, memulai kecintaannya pada budaya dan bahasa Rusia. Ketika Merkel berusia 15 tahun, ia melakukan perjalanan ke Moskow untuk mengikuti olimpiade berbahasa Rusia, itu semua berkat ketekunannya. Merkel kemudian bergabung dengan Young Pioneers, semacam organisasi pemuda GDR pada tahun 1962 dan Free German Youth pada tahun 1968 (Crawford & Czuczka, 2013). Pada tahun 1973, Merkel memutuskan untuk pergi ke Leipzig untuk mengenyam pendidikan fisika di universitas tertua kedua di Jerman, yakni Universitas Leipzig. Disana ia bertemu dengan Ulrich Merkel dan mereka menikah empat tahun kemudian di gereja Templin. Di universitas itu juga Angela Merkel kemudian mendapatkan gelar doktornya pada tahun 1986.

Latar belakang keluarga Merkel, khususnya iman Kristen orangtuanya dan keterlibatan keduanya dalam gereja, memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengasuhannya. Nilai – nilai mereka, dikombinasikan dengan pengalamannya tumbuh di Jerman Timur, memainkan peran dalam membentuk pandangan dan prinsip – prinsip Merkel sepanjang hidup dan karier politiknya.

2.1.2 Karir Politik

Secara politis, awal 1970-an merupakan tahun – tahun penting bagi Jerman Timur dan Barat, terutama bagi Timur, setelah kebijakan Ostpolitik diluncurkan. Kebijakan ini diusung oleh Willy Brandt, Menteri Luar Negeri pertama (1966-1969) dan Kanselir terpilih bagi Republik Federal Jerman (FRG). Brandt menekankan fokus pada urusan luar negeri, terutama urusan yang berhubungan dengan pemulihan dan peningkatan hubungan dengan Jerman Timur, pendekatan ini bertolak belakang dengan prinsip dasar kebijakan luar negeri Jerman Barat hingga tahun 1969 yang disebut dengan *Hallstein Doctrine*.[2] Ostpolitik merupakan sebuah doktrin kebijakan luar negeri baru yang menjadi ciri kebijakan timur Republik Federal Jerman saat itu. Disamping itu semua, Brandt tidak hanya mengembangkan pendekatan ke arah timur, tetapi juga mengadopsi berbagai strategi untuk membantu menyeimbangkan *(balancing)* hegemoni Amerika yang sangat terasa di

[2] *Hallstein Doctrine* merupakan prinsip yang menyatakan bahwa Jerman Barat tidak akan pernah memiliki hubungan diplomatik dengan negara mana pun yang mengakui Jerman Timur.

benua itu (Hamzaoglu, 2022). Ostpolitik adalah awal dari serangkaian proses panjang pemulihan hubungan Barat dan Timur hingga puncaknya pada peristiwa runtuhnya Tembok Berlin dan reunifikasi atau penyatuan kembali Jerman dua puluh tahun kemudian. Disaat yang bersamaan dengan peristiwa bersejarah bagi Jerman tersebut, Angela Merkel mulai memasuki dunia politik.

Bagi Kanselir Jerman Barat, Helmut Kohl, jatuhnya Tembok Berlin menandakan adanya pemulihan, dengan kembalinya Jerman ke "keadaan aslinya" dan berakhirnya Jerman sebagai negara yang terpecah selama 40 tahun. Namun bagi Merkel, generasi yang lebih muda, peristiwa runtuhnya Tembok Berlin telah membuka kesempatan baginya untuk bereksperimen. Ia menunjukkan ambisinya untuk membuktikan bahwa orang yang berasal dari Timur dapat berhasil dan bukanlah "orang Jerman kelas dua" (Crawford & Czuczka, 2013). Dalam beberapa minggu ketika reunifikasi sedang berjalan, perekonomian Jerman Timur hancur berantakan dan sepertiga dari populasi Republik Demokratik Jerman kehilangan pekerjaan mereka. Melihat persoalan yang hadir, Merkel memutuskan untuk bergabung dengan Republik Federal Jerman oleh karena tatanan ekonomi dan politiknya yang lebih baik, lebih rasional, lebih efisien, dan lebih bebas (Marton, 2021). Merkel kemudian bergabung dengan Partai Kebangkitan Demokrat atau Democratic Awakening (DA), sebuah partai independen kecil yang memiliki ikatan dengan Gereja Lutheran, yang pada akhirnya bergabung dengan Kohl dan Partai Persatuan Demokrat Kristen Jerman

miliknya. Partai Kebangkitan Demokrat (DA) didirikan pada akhir tahun 1989 sebagai reaksi terhadap meningkatnya tuntutan reformasi politik dan perubahan demokrasi di Jerman Timur. Terlepas dari keberadaan partai tersebut yang relatif singkat, perannya dalam mengadvokasi reformasi demokrasi dan keterlibatannya dalam transisi politik sangatlah penting. Beberapa anggotanya memainkan peran penting dalam negosiasi yang mengarah kepada reunifikasi Jerman, salah satunya ialah Lothar de Maizière, yang merupakan Kepala Pemerintahan Jerman Timur pada bulan – bulan menjelang reunifikasi.

Pada bulan Maret 1990, pemimpin Partai Kebangkitan Demokrat (DA), Wolfgang Schnur, diekspos sebagai informan Stasi, dan kemudian digantikan oleh Rainer Eppelmann.[3] Eppelmen merupakan salah satu orang yang berjasa dalam mendukung karier politik Merkel. Ia menyarankan Merkel sebagai juru bicara bagi Lothar de Maizière, setelah dirinya melihat kinerja Merkel. Pada Oktober 1990 (bulan dimana Partai Kebangkitan Demokrat (DA) bergabung dengan CDU) Merkel memenangkan kursi di Bundestag baru di Bonn, ibu kota pertama Jerman setelah penyatuan kembali. Dia memperkenalkan dirinya kepada Kanselir Jerman, Helmut Kohl, dan de Maizière menyarankan agar Kohl membawanya ke kabinetnya. Merkel pun diangkat menjadi Menteri Perempuan dan Pemuda (Packer, 2014). Pada saat itu, Partai Persatuan Demokrasi Kristen

[3] Stasi, kependekan dari "Ministerium für Staatssicherheit" (Kementerian Keamanan Negara), adalah agen polisi rahasia resmi Republik Demokratik Jerman selama era Perang Dingin.

(CDU) didominasi oleh kaum pria Katolik dari Barat, namun berkat kegigihan dan kecerdasannya Merkel mampu tampil sebagai sosok yang memiliki posisi kuat di partai itu (Whalan, 2021). Tidak berselang lama, Merkel kembali ditunjuk Kohl untuk menjabat sebagai Menteri Lingkungan Hidup, Konservasi Alam, dan Keselamatan Nuklir dari 1994 hingga 1998. Sedari awal, Kohl menyebut Merkel dengan "das Mädchen" atau "si gadis" karena ia merupakan menteri termuda di pemerintahannya (The Sydney Morning Herald, 2009). Kohl dikenal sebagai mentor politik Merkel selama ia berada di Bundestag, ia turut berkontribusi pada pembangunan karier politik Merkel disana.

Gambar 2.3

Angela Merkel dan Helmut Kohl Ketika Mengikuti Konferensi Partai CDU Pada Desember 1991

Sumber: *The Chancellor: The Remarkable Odyssey of Angela Merkel*, Kati Marton, 2021

Setelah 16 tahun berkuasa, Helmut Kohl kehilangan jabatannya sebagai kanselir di putaran kelima pada tahun 1998. Pada tahun berikutnya, Kohl terlibat dalam skandal keuangan yang melibatkan tuduhan penggalangan dana ilegal untuk kampanye pemilihannya, yang dimulai pada tahun 1982. Posisi Kanselir kemudian diisi oleh Gerhard Schröder yang berasal dari Partai Demokrat Sosial (SPD). Ini menyebabkan Merkel dikeluarkan dari kabinet ketika Schröder memasang menteri barunya. Namun pada tahun 2000, Merkel kembali mendapat jabatan di dalam Partai Persatuan Demokrasi Kristen (CDU), ia terpilih sebagai Sekretaris Jenderal partai tersebut, menjadikannya wanita pertama yang memegang jabatan itu (Marton, 2021).

Di tengah skandal Kohl, Merkel tidak membela Kohl. Ketika ia yakin bahwa Kohl salah, ia membagikan pendapatnya kepada pers dan publik Jerman. Merkel menulis sebuah artikel surat kabar yang mengutuk tindakan Helmut Kohl. Beberapa anggota partai CDU meyakini bahwa Merkel telah mengkhianati mentornya, yakni pria yang membantunya dalam memperkuat posisi yang dimiliki dalam politik nasional. Namun Merkel mengatakan Kohl telah menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan dan seharusnya tidak lagi menjadi pemimpin partai. Merkel menempatkan kesetiaannya pada kebenaran di atas kesetiaan pada partai dan ia menerima banyak pujian untuk hal ini. Mengikuti skandal tersebut, CDU berada di dalam krisis. Pada pertemuan partai selama tiga hari di bulan April 2000, para anggota CDU yang tersisa berkumpul kembali dan

membahas masa depan partai. Kohl telah memilih seorang penerus untuk menggantikannya sebagai pemimpin partai selanjutnya, namun partai itu pada akhirnya memilih Merkel sebagai pemimpin CDU pada 10 April 2000 (Mills, 2008).

Ketika pemilihan umum hadir pada tahun 2002, Merkel dan banyak orang di partai itu mengharapkan dirinya menjadi kandidat kanselir bagi CDU melawan Schröder. Tetapi sebaliknya, Merkel justru mengalami kemunduran politik terbesar pertamanya. Edmund Stoiber, kepala Serikat Sosial Kristen atau Christian Social Union (CSU) yang merupakan *sister party* dari CDU, memutuskan untuk menantang Merkel untuk posisi itu. Stoiber tampil sebagai kandidat CDU-CSU dan maju melawan Schröder, namun berakhir dengan kekalahan. Dalam pemilihan umum pada 18 September 2005, Merkel memimpin koalisi CDU/CSU sebagai kandidat kanselir. CDU-CSU menerima 35,2 persen suara sedangkan Koalisi SPD-Hijau milik Schröder mendapat 34,2 persen (Mills, 2008). Kedua partai sama – sama mengklaim kemenangan karena tidak ada partai yang memiliki mayoritas kursi (koalisi yang berkuasa harus memiliki lebih dari 50 persen kursi di Bundestag). Merkel akhirnya memulai negosiasi dengan SPD untuk membentuk koalisi besar. Setelah beberapa minggu bernegosiasi, kesepakatan pun tercapai dan Merkel secara resmi menjadi Kanselir Jerman pada 22 November 2005.

2.2 Kebijakan Energi Jerman dan Proyek Nord Stream 2

2.2.1 Kebijakan Energi Jerman Periode Merkel (2005 – 2021)

Kebijakan energi Jerman, umumnya dikenal sebagai "Energiewende" (transisi energi), adalah strategi komprehensif dan jangka panjang yang bertujuan untuk mengubah sektor energi negara menjadi lebih berkelanjutan, rendah karbon, dan terdesentralisasi. Energiewende dimulai dengan apa yang dikenal sebagai konsep energi Energiekonzept pada tahun 2010. Pengajuan Energiekonzept pada awalnya diajukan untuk menggambarkan strategi jangka panjang bagi sistem energi berkelanjutan hingga tahun 2050. Namun terlepas dari upaya pemerintah untuk memperkenalkan Energiekonzept sebagai rencana energi jangka panjang tersebut, sebagian besar pakar dan masyarakat Jerman berfokus pada satu masalah yakni mengenai persoalan perpanjangan masa pakai reaktor nuklir yang dinyatakan sebelumnya pada tahun 2009 (Jacobs, 2012). Pada Maret 2011, Kanselir Jerman Angela Merkel memutuskan untuk mempercepat penghentian tenaga nuklir dengan melaksanakan penutupan seluruh pembangkit listrik tenaga nuklir pada tahun 2022. Itu merupakan sikap yang diambil menyusul bencana nuklir Fukushima pada tahun tersebut. Jerman kemudian menerbitkan konsep energi "baru" pada 6 Juni 2011 yang merupakan penyesuaian kebijakan energi Jerman sebagai reaksi terhadap Fukushima, yang kemudian disebut Energiewende. Namun elemen inti dari kebijakan energi itu tetaplah sama, yakni penonaktifan pembangkit listrik tenaga nuklir pada tahun 2022, peningkatan pangsa energi terbarukan,

pengurangan konsumsi energi primer, dan pengurangan emisi gas rumah kaca (Growitsch & Höffler, 2019). Meskipun istilah Energiewende mulai mendapat popularitasnya sejak tahun 2011, akan tetapi istilah ini telah diperkenalkan pertama kali pada tahun 1980 oleh Öko-Institut dalam buku yang terbitkannya (Jacobs, 2012).

Energiewende berakar dari dalam sejarah dan masyarakat Jerman. Ini berangkat dari oposisi publik Jerman terhadap nuklir pada tahun 1980-an dan 1990-an serta meningkatnya kekhawatiran terhadap perubahan iklim pada tahun 2000-an (Agora Energiewende, 2022a). Bahkan sebelumnya, tepatnya pada tahun 1970-an, telah terdapat gerakan lingkungan kuat yang didorong oleh kelompok pelajar dan gerakan anti-perang di Jerman Barat selama Perang Dingin berlangsung. Kekhawatiran akan perang nuklir dan keamanan energi selama krisis minyak tahun 1970-an menjadi pemicu kekhawatiran mengenai penggunaan pembangkit nuklir dan kebutuhan untuk meminimalkan resiko yang ada. Oposisi terhadap nuklir semakin diperparah setelah krisis Chernobyl pada tahun 1986 (Cunningham, 2017). Perjalanan Jerman menuju energi terbarukan dimulai oleh meningkatnya kesadaran akan lingkungan tersebut. Oleh karena itu, timbul diskusi awal mengenai kerentanan akan ketergantungan terhadap bahan bakar fosil dan perlunya mempromosikan sumber energi terbarukan. Ini menghasilkan sebuah dorongan yang kuat untuk mengembangkan teknologi energi terbarukan dari dalam lingkup nasional. Merespon hal tersebut, Jerman kemudian mulai menerapkan *feed-in-tariff* pada tahun 2000 yang ditetapkan

berdasarkan dengan UU Sumber Energi Terbarukan *(Renewable Energy Sources Act*) untuk mendukung percepatan dalam pengembangan teknologi tersebut (Woerlen, 2014).

Gambar 2.4

Demonstrasi Anti-Nuklir di Universitas Bonn, Jerman Barat pada Tahun 1979

Sumber: *Cunningham (2017)*

Jerman sendiri telah menetapkan target yang ambisius bagi peralihannya menuju sumber energi terbarukan dengan berencana untuk memenuhi seluruh kebutuhan listriknya dengan pasokan sumber energi terbarukan pada tahun 2035. Jerman bermaksud untuk meningkatkan pangsa energi terbarukan dalam konsumsi akhir *(final consumption)* negara tesebut menjadi 30% pada tahun 2030. Adapun ini dilakukan dengan tujuan

untuk mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 65% pada tahun 2030, hal ini juga dilakukan untuk mencapai netralitas karbon pada tahun 2045 (International Trade Administration, 2022).

Perlu diketahui bahwa Jerman merupakan negara dengan konsumsi energi terbanyak di Uni Eropa, diikuti oleh Perancis dan Inggris (Tabel 2.5). Berdasarkan data total pasokan energi Eropa pada tahun 2020, Jerman tercatat membutuhkan setidaknya 11.654.314 TJ untuk memenuhi permintaan energi dalam negerinya. Permintaan energi tertinggi negara itu diisi oleh permintaan akan minyak *(oil)* dan gas bumi *(natural gas)*, dengan total masing – masing pasokan yang dibutuhkan telah mencapai lebih dari 3.000.000 TJ. Pasokan terbesar ketiganya ialah batu bara *(coal)* dengan 1.864.960 TJ, diikuti oleh bahan bakar hayati *(biofuels)* dengan total pasokan sebesar 1.320.038 TJ. Pada tahun 2020, nuklir masih menjadi salah satu penyokong energi nasional Jerman dengan total pasokan sebesar 702.349 TJ, namun kemudian secara resmi berhenti dipergunakan pada tahun 2022. Sebagai ekonomi terbesar di Uni Eropa dan salah satu negara terpadat di benua itu, Jerman memiliki permintaan energi yang signifikan untuk mendukung basis industri, sektor transportasi, dan kebutuhan perumahannya. Selama berabad – abad, Jerman telah banyak mengandalkan bahan bakar fosil (minyak bumi, gas alam, dan batu bara) sebagai sumber energi bagi kebutuhan domestiknya (Grafik 2.6). Gas alam dan minyak bumi adalah dua dari tiga bahan bakar fosil yang sebagian besar digunakan, terutama pada sektor perumahan dan komersial (IEA, 2020).

Tabel 2.5

Total Pasokan Energi Eropa, 2020

	↑ Total	Coal	Natural gas	Nuclear	Hydro	Wind, solar, etc.	Biofuels and waste	Oil
	TJ	TJ	TJ	TJ	TJ	TJ	TJ	TJ
Total Europe	76877341	9784726	20401656	9113088	2351418	3689213	7836242	23655375
Germany	11654314	1864960	3123351	702349	65959	697172	1320038	3948990
France	9138974	221854	1460981	3859995	223423	221343	706402	2606192
United Kingdom	6444334	230522	2591817	548491	24314	321009	599237	2064468
Republic of Turkiye	6151444	1673881	1662755		281140	633140	158349	1744318
Italy	5756349	213369	2440311		171186	390925	612685	1811951
Spain	4567702	123352	1169273	635989	109825	355529	316474	1845455
Poland	4260205	1711033	716234		7626	68358	498522	1210212
Ukraine	3615846	956561	998296	837111	27230	33264	177631	592119

Sumber: *IEA World Energy Balances*

Grafik 2.6

Total konsumsi akhir menurut sumber, Jerman 1990-2020

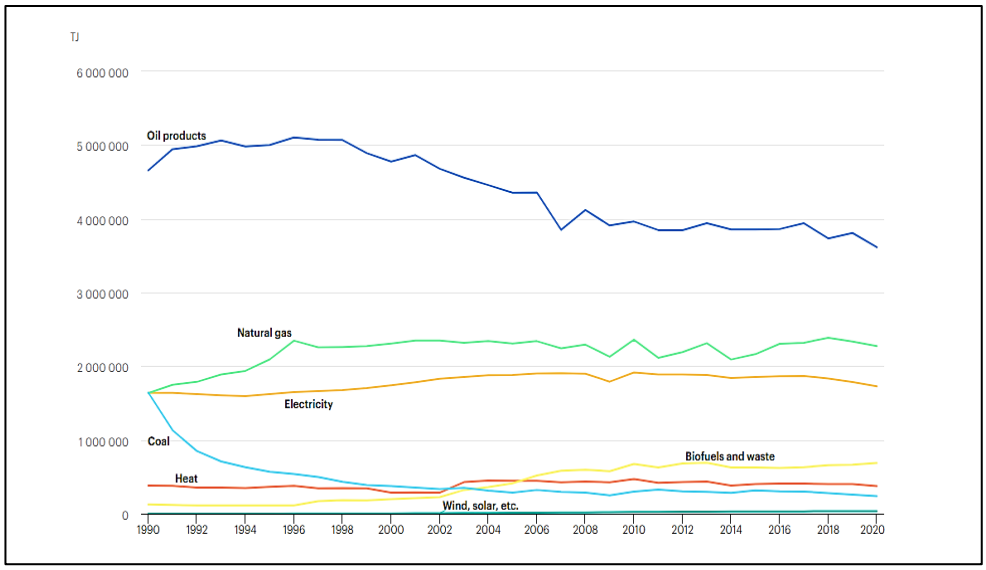

Sumber: *IEA World Energy Balances*

Grafik 2.6 diatas menunjukkan besaran konsumsi akhir masyarakat Jerman pada tahun 1990 – 2020. Grafik tersebut memperlihatkan bahwa konsumsi energi tertinggi Jerman selama 30 tahun terakhir berasal dari minyak dan gas alam, dengan total konsumsi akhir minyak pada tahun 2020 adalah sebesar 3.614.224 TJ dan gas alam adalah sebesar 2.275.117 TJ. Sejak tahun 1996, konsumsi minyak secara berkala mengalami penurunan, sedangkan konsumsi gas alam masih terbilang stabil. Secara keseluruhan, grafik tersebut dengan jelas menunjukkan bahwa bahan bakar fosil masih relevan digunakan hingga kini.

Dalam upayanya untuk mencapai netralitas iklim pada tahun 2045, Jerman perlu untuk menghentikan pemakaian bahan bakar fosil, mempercepat penyebaran energi terbarukan dan mengurangi kosumsi energi dalam negeri secara keseluruhan. Hingga saat ini, Jerman telah berusaha secara bertahap untuk memberlakukan transformasi energi, terutama dalam sektor listrik *(electricity)* yang sebagian besar bertanggung jawab atas semua emisi gas rumah kaca di Jerman. Dalam garis besar, Jerman telah berupaya untuk menerapkan langkah – langkah efisiensi energi untuk menurunkan biaya transisi dan infrastruktur energi (Agora Energiewende, 2022). Dalam prosesnya, kebijakan energi Jerman (Energiewende) telah membuat kemajuan yang signifikan dalam meningkatkan pangsa energi terbarukan dan mengurangi emisi gas rumah kaca. Namun, ia juga menghadapi tantangan, termasuk meningkatnya biaya energi dan perlunya penyesuaian kebijakan yang berkelanjutan untuk

memenuhi target. Secara keseluruhan, kebijakan energi Jerman berfungsi sebagai contoh penting dari komitmen Jerman untuk melakukan transisi menuju masa depan energi yang berkelanjutan.

2.2.2 Nord Stream 2 dalam Konteks Kebijakan Energi Merkel

Jerman memiliki ketergantungan pada gas alam untuk memenuhi sebagian besar kebutuhan energinya dan Nord Stream 2 dipandang sebagai cara untuk mengamankan pasokan gas yang stabil dan andal bagi negara itu. Energiewende telah membuat Jerman "tersudut", ini dikarenakan transisi energi yang negara tersebut kejar nyatanya menghadirkan kesulitan lain bagi Jerman. Untuk memenuhi target ambisius atas transisi energi negara, Jerman tidak dapat secara langsung menghentikan penggunaan bahan bakar fosil begitu saja. Transisi energi membutuhkan proses dan waktu yang cukup panjang untuk benar – benar dapat dicapai. Penghentian pemakaian tenaga nuklir berarti Jerman harus bergantung pada energi lain untuk mengisi kekosongan yang disebabkan dari ketiadaan nuklir sebagai sumber energi. Dengan ini, maka pemerintah Jerman kemudian mengupayakan kebijakan untuk memaksimalkan ketergantungan negara itu pada minyak dan gas untuk memungkinkan Jerman untuk terus maju dalam transisi energinya. Penghapusan tenaga nuklir merupakan bagian dari Energiewende sebagai langkah menuju ekonomi rendah karbon dan gas alam *(natural gas)* tidak hanya menghasilkan setengah dari emisi yang dihasilkan oleh batubara *(coal)*, tetapi bagi Jerman itu merupakan sumber

energi yang sangat terjangkau dan andal yang diperlukan untuk banyak sektor ekonomi domestik (Kimani, 2022).

2.2.2.1 Sejarah Perkembangan Nord Stream 2

Nord Stream 2 adalah proyek pipa gas alam yang bertujuan untuk mengangkut gas alam dari Rusia ke Jerman melalui Laut Baltik. Ini merupakan proyek kelanjutan dari pipa Nord Stream yang sudah ada sebelumnya, yang mulai beroperasi pada tahun 2011. Gagasan Nord Stream 2 pertama kali diusulkan oleh perusahaan energi milik Rusia, Gazprom, pada tahun 2011 dan didukung oleh beberapa perusahaan energi Eropa, termasuk E.ON Jermadan BASF/Wintershall, OMV Austria, ENGIE Prancis, dan perusahaan Inggris-Belanda yakni Royal Dutch Shell (Russell, 2021). Pipa Nord Stream 2 direncanakan untuk berjalan paralel dengan pipa Nord Stream 1 dan menggandakan kapasitasnya, dimana rute pipa yang direncanakan membentang sekitar 1.200 kilometer dari pantai Rusia di Ust-Luga ke Greifswald di Jerman. Adapun total kapasitasnya ialah 55 miliar meter kubik gas per tahun, namun jika ditambah Nord Stream 1 maka total kapasitas gas yang di pasok per tahun menjadi sebanyak 110 miliar meter kubik gas (Stevens, 2019). Proyek ini bertujuan untuk meningkatkan pengiriman langsung gas alam Rusia ke Eropa dan meningkatkan ketahanan energi (*energy security*) Eropa.

Gambar 2.7

Peta Nord Stream 1 dan 2

Sumber: *Nord Stream 2 AG,* Pipeline Technology Journal, 2023

Nord Stream AG merupakan perusahaan yang bertanggung jawab atas perencanaan, konstruksi, dan pengoperasian jaringan pipa gas alam Nord Stream (1 dan 2). Ini merupakan perusahaan patungan (*joint venture*) antara lima perusahaan (Gazprom, Wintershell Dea, E.ON, N.V. Nederlandse Gasunie, ENGIE) yang didirikan di Zug, Switzerland, pada tahun 2005 dan dibentuk awalnya untuk pembangunan Nord Stream yang pertama (Nord Stream AG, n.d.). Perlu diketahui bahwa struktur kepemilikan saham Nord Stream 1 dan Nord Stream 2 berbeda, ini dikarenakan kedua Nord Stream tersebut dikembangkan pada waktu yang berbeda, juga dengan pertimbangan dan keadaan yang berbeda. Iklim politik seputar proyek pada dasarnya dapat secara signifikan mempengaruhi

keterlibatan pemegang saham perusahaan. Ketika Nord Stream 2 sedang dikembangkan, beberapa negara di Eropa, khususnya yang mengkhawatirkan ketergantungan energi Rusia, melayangkan kritik dan melakukan upaya perlawanan. Penolakan ini yang kemudian menyebabkan beberapa perusahaan menolak untuk berinvestasi di Nord Stream 2 sehingga akan didapatkan pemegang saham yang berbeda.

Tabel 2.8

Pemegang Saham Nord Stream 1

No	Nama Perusahaan	Persentase Saham
1	Gazprom	51.0%
2	Wintershall Dea	15.5%
3	E.ON	15.5%
4	Gasunie	9.0%
5	ENGIE	9.0%

Sumber: *Our Shareholders,* Nord Stream Website, 2013

Tabel 2.9

Pemegang Saham Nord Stream 2 (Menurut Rencana)

No	Nama Perusahaan	Persentase Saham
1	Gazprom	51.0%
2	BASF/Wintershall	10.0%

3	E.ON	10.0%
4	OMV	10.0%
5	Royal Dutch Shell	10.0%
6	ENGIE	9.0%

Sumber*: FACTBOX: The Nord Stream pipelines and what is known about their destruction,* Tass, 2023

Tabel 2.8 menunjukkan perusahaan dan besaran saham yang ditentukan untuk proyek Nord Stream 1, sedangkan Tabel 2.9 menunjukkan perusahaan dan besaran saham yang ditentukan untuk proyek Nord Stream 2. Adapun pemegang saham untuk Nord Stream 1 ialah Gazprom dengan saham sebesar 51%, Wintershall Dea dengan 15.5%, E.ON dengan 15.5%, Gasunie dengan 9.0%, dan ENGIE dengan 9.0%. Pada Nord Stream 2, pemegang saham dan besaran yang direncanakan yakni Gazprom dengan 51%, BASF/Wintershall dengan 10%, E.ON dengan 10%, OMV dengan 10%, Royal Dutch Shell dengan 10%, dan ENGIE dengan 9%. Pada bulan Agustus 2016, terdapat pembatalan keputusan untuk mendirikan perusahaan patungan (*joint venture*) antara 6 perusahaan besar yang terlibat dalam proyek Nord Stream 2 (lihat Tabel 2.9) karena keberatan yang diajukan oleh otoritas anti-monopoli Polandia (UOKiK) (Nijhuis & Wettengel, 2023). Pada tahun 2017, Gazprom menjadi pemegang saham tunggal di Nord Stream 2. Dalam menemukan cara alternatif untuk menjalankan proyek tersebut, maka dibuatlah penandatanganan perjanjian

pembiayaan dengan anak perusahaan Gazprom yakni Nord Stream 2 AG (yang bertanggungjawab atas pengembangan Nord Stream 2) oleh beberapa perusahaan seperti Uniper, OMV, BASF/Wintershall, ENGIE dan Royal Dutch Shell (Tass, 2023). Dimana mereka menyediakan setengah dari pembiayaan proyek sebesar €4,75 miliar (Nijhuis & Wettengel, 2023). Meskipun ditemui beberapa tantangan dari berbagai pihak, namun pembangunan proyek Nord Stream 2 telah dimulai pada tahun 2018 setelah Jerman memberikan Nord Stream 2 izin untuk melakukan konstruksi di wilayah perairan dan pendaratan mereka. Kontruksi pipa gas ini pun selesai pada tahun 2021.

2.2.2.2 Kontroversi dan Keterlibatan Merkel dalam Nord Stream 2

Pembangunan proyek Nord Stream 2 mendapat banyak tentangan dan kecaman dari berbagai kelompok kepentingan. Banyak penentang Nord Stream 2 berpendapat bahwa proyek tersebut tidak mendukung diversifikasi energi Uni Eropa yang telah disepakati setelah krisis gas pada tahun 2009 yang lalu. Mereka mengatakan bahwa Nord Stream 2 dipastikan akan meningkatkan ketergantungan Eropa pada gas Rusia, dimana itu dapat memperkuat posisi Rusia sebagai pemasok gas dominan ke Eropa dan merusak upaya diversifikasi sumber energi (Umbach, 2018). Banyak dari mereka yang turut menyuarakan kekhawatiran akan ketergantungan yang tinggi pada pemasok gas tunggal, terutama pada Rusia, yang sebelumnya pernah menggunakan energi sebagai alat politik. Mereka khawatir bahwa

Rusia dapat menggunakan *leverage* yang dimilikinya untuk mempengaruhi politik Eropa atau mengancam pemenuhan energi Eropa (CSIS, 2022).

Beberapa negara Eropa Timur seperti Ukraina dan Polandia serta negara – negara Baltik telah menyatakan keprihatinan tentang dampak Nord Stream 2 pada kehilangannya sejumlah besar pendapatan transit gas mereka dan kemungkinan peningkatan pengaruh Rusia di Eropa. Menteri Luar Negeri Polandia, Jacek Czaputowicz, berpendapat bahwa jalur pipa Nord Stream nantinya akan memberi Rusia alasan untuk meningkatkan kehadiran militernya di Laut Baltik (Stevens, 2019). Bahkan ketika negara Eropa lainnya melayangkan segelintir kecaman terhadap proyek tersebut dan menyebutnya sebagai senjata geopolitik Rusia, hanya Jerman yang secara terus – menerus memperjuangkan keberjalanan proyek tersebut. Amerika Serikat sendiri mengkritik proyek Nord Stream 2 oleh karena kekhawatiran tentang ketergantungan Eropa yang semakin besar pada gas Rusia dan kemungkinan implikasi geopolitik yang negatif. Upaya kongres US untuk memblokir pipa telah difokuskan pada sanksi, termasuk melalui undang-undang sanksi yang semakin ketat yang diberlakukan pada tahun 2017, 2019, dan 2020 (Congressional Research Service, 2022).

Jerman secara historis bergantung pada impor gas Rusia, dan ketergantungan ini telah menjadi bahan perdebatan negara EU. Jerman adalah konsumen gas alam terbesar di Uni Eropa dan sebagian besar impor gas Jerman berasal dari Rusia, di mana Gazprom adalah pemasok utamanya. Namun Jerman menghiraukan segala bentuk kekhawatiran yang

ditunjukkan banyak negara tersebut, dengan alasan bahwa proyek tersebut murni proyek ekonomi.

Lebih jauh, Jerman pada dasarnya telah mematikan reaktor nuklir terakhirnya pada tahun 2022. Ini berawal dari bencana nuklir Fukushima 2011 di Jepang, yang kemudian menyebabkan evaluasi ulang kebijakan energi di Jerman. Dengan dimatikannya reaktor tersebut, maka Jerman diharuskan untuk mencari jalan lain untuk mengisi kekosongan akan kebutuhan gas alam (Karnitsching, 2021). Oleh karena itu, pembangunan Nord Stream 2 menjadi penting bagi pemenuhan yang ada. Merkel secara konsisten membela proyek dan menekankan pentingnya keamanan energi dan kepentingan ekonomi Jerman. Ia berpendapat bahwa Nord Stream 2 akan berkontribusi pada keamanan energi Jerman dengan mendiversifikasi rute pasokan gas dan mengurangi ketergantungan pada negara transit seperti Ukraina. Dia menekankan perlunya pasokan gas alam yang andal dan langsung untuk memenuhi kebutuhan energi Jerman.

Pada 15 Desember 2017, Merkel memberikan izin parsial untuk konstruksi Nord Stream 2 di Laut Baltik, baru pada tanggal 31 Januari, persetujuan penuh diberikan oleh Merkel untuk konstruksi proyek Nord Stream 2. Menyadari kekhawatiran yang ada, maka Merkel berupaya untuk meyakinkan negara – negara tersebut, terutama Ukraina, mengenai proyek ini. Pada April 2018, Merkel memberikan pernyataan bahwa Ukraina tidak akan dikecualikan dari Nord Stream 2 dan dengan demikian dirinya berusaha menengahi perselisihan antara Rusia dan Ukraina (Nijhuis &

Wettengel, 2023). “Gas tidak dapat digunakan sebagai senjata” ucap Merkel pada pertemuannya dengan Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, pada Agustus 2021 di Kyiv. Ia kemudian melanjutkan pembicaraan dengan mengatakan bahwa Jerman siap menerima sanksi kembali jikalau Rusia terbukti menggunakan pipa gas tersebut sebagai senjata (Olearchyk & Miller, 2021). Penting untuk dicatat bahwa dukungan Merkel bagi Nord Stream 2 bukan tanpa kontroversi dan sikapnya terhadap proyek itu mendapat kritik, baik di dalam negeri maupun internasional. Namun Merkel dengan teguh berusaha mengadvokasi dan menggalang dukungan bagi proyek Nord Stream 2.